

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 MAJALAH PILARS
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 **12** 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2005

Pembangkit Suralaya Bocor

JAKARTA – Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya Unit 7 yang berkapasitas 600 MW mengalami kebocoran pada salah satu boiler. Hal ini mengakibatkan pasokan listrik pada sistem kelistrikan Jawa Bali akan defisit sebanyak 200-250 MW, hingga hari ini (Jumat, 12/8).

Karena itu, PLN menghimbau pelanggan melakukan penghematan listrik ketika beban puncak 17.00-22.00. "Kebocoran terjadi pada sambungan pipa ekonomiser yang terkena suhu sangat tinggi," kata Kepala Pusat Pengendalian dan Pengaturan Beban (P3B) PLN Muldjo Adji AG melalui pesan singkatnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/8).

Dia mengatakan, beban puncak listrik Kamis (11/8) malam diperkirakan mencapai 14.500 MW, sementara kemampuan pasok pembangkit 14.290 MW. Sementara hari ini pasokan diperkirakan defisit sekitar 200-250 MW.

Menurut dia, perbaikan kebocoran boiler diperkirakan akan selesai malam ini, sehingga Minggu (14/8) sudah kembali normal. "Kita sangat berharap, masyarakat berpartisipasi dengan hemat listrik," harap dia.

Saat ini, kapasitas listrik PLTU Suralaya yang mencapai 3.400 MW, atau 25% dari kapasitas seluruh jaringan listrik interkoneksi Jawa Bali yang mencapai 15.000 MW. Dengan kata lain, PLTU Suralaya merupakan tulang punggung pembangkitan Jawa Bali. PLTU Suralaya yang terdiri tujuh pembangkit, usianya sudah cukup tua.

Sebanyak empat pembangkit berumur 21 tahun dan tiga pembangkit lainnya

telah mencapai umur 10 tahun.

Sebelumnya, salah satu pembangkit PLTU Suralaya dengan kapasitas listrik 600 MW juga pernah mengalami kebocoran boiler pada tangki air mulai Sabtu 4 Juni 2005. PLN selesai memperbaikinya minggu berikutnya hari Kamis (9/6).

Terkait dengan masalah teknis yang terjadi di PLTU Suralaya, Direktur Niaga dan Pelayanan PLN Sunggu Anwar

Aritonang mengatakan, masalah teknis bisa saja terjadi. Namun, dia berjanji gangguan ini tidak akan mengurangi kenyamanan pelanggan dalam mengonsumsi tenaga listrik, khususnya soal pemadaman bergilir.

"Ya, memang ada sedikit defisit karena ada gangguan. Kami sedang mengatasinya. Kalau 210 mw defisit di Jawa. Jika dibagi empat daerah, masing-masing daerah hanya kekurangan 505 MW itu sekitar 10 menit. Jadi tidak akan terasa," ujarnya.

"Kebocoran terjadi pada sambungan pipa ekonomiser yang terkena suhu sangat tinggi."

Muldjo Adji AG

Beli Gas

Deputi Energi Primer PLN Tonny Agus Mulyantono mengatakan, pertengahan Agustus 2005 PLN akan menandatangani nota kesepahaman pembelian gas flare sebesar 5 - 7 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dengan PT Pertamina di wilayah remote area Tuban Jawa Timur (Jatim).

Namun dia belum bisa menjelaskan secara detail, kapan dan seperti apa pengaruhnya untuk pasokan listrik interkoneksi Jawa Bali. "Ini equal untuk menghasilkan listrik sekitar 20 - 30 MW, sehingga kami bisa membangun PLTGU di daerah itu dengan kapasitas maksimal 50 M," katanya. (ari)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 MAJALAH PILARS
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2005

Harga BBM dan Tarif Listrik Pukul Industri

JAKARTA - Kalangan industri meminta kepada pemerintah dan PT PLN (persero) agar kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik tidak dilakukan tiba-tiba. Karena kebijakan itu bisa memukul dunia usaha dan industri.

"Ya, kami meminta adanya keseimbangan harga. Kami juga berharap PLN tidak menurunkan pelayanannya, karena bagaimana pun kami tidak bisa lari dari ketergantungan penggunaan listrik PLN," kata seorang perwakilan Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jasimun di sela acara diskusi 'Dampak Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk Industri' di Jakarta, Kamis (11/8).

Dia mengaku, untuk kenaikan tarif listrik hingga dua kali bagi industri itu berdampak pada kenaikan biaya sebesar 33% yang harus dibayarkan kepada PLN.

Ia juga mengatakan, industri tekstil tidak mungkin mengurangi waktu operasinya, dengan harapan menghindari waktu beban puncak. Pasalnya, industri ini memiliki masa operasi 24 jam atau lebih, dari 350 jam dalam sebulan.

Sementara itu, Direktur Utama Armada Pelayaran Nasional Oentoro Suryo memperkirakan, tarif angkutan laut kemungkinan akan naik akibat kenaikan harga BBM untuk industri. "Tapi, kenaikan tidak lebih dari 15% dan proporsional," imbuh dia. (c63)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input checked="" type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31									
HALAMAN : <i>A 22</i>											TAHUN 2005

Pertamina Pasok Solar ke PLN

Biaya pengadaan solar untuk mengganti gas belum disetujui pemerintah.

JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Negara akan mendapatkan penggantian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebesar 100 ribu kiloliter dari Pertamina. Penggantian itu karena gas yang seharusnya disalurkan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk pembangkit listrik PLN dialihkan untuk memenuhi kebutuhan industri di Jawa Timur, yang kini kesulitan gas.

Kepala Divisi BBM PT Pertamina (Persero) Achmad Faisal mengatakan, pasokan pengganti itu merupakan hasil kesepakatan antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas), PGN, PLN, dan Pertamina. "Kami siap memasok sekitar 10 ribu kiloliter solar per bulan kepada PLN," ujarnya di Jakarta kemarin.

Ia menjelaskan, pasokan pengganti itu dijual berdasarkan harga industri. Besarnya berfluktuasi atau sesuai dengan harga minyak mentah dunia. Saat ini harga solar industri Rp 5.480 per liter, berpatokan pada harga minyak mentah US\$ 60 per barel. Namun, karena kenaikan har-

ga minyak mentah saat ini sudah mencapai US\$ 64 per barel, harga solar bisa mencapai Rp 5.700 per liter.

Semula PLN meminta harga Rp 850 per liter sesuai dengan harga gas yang biasa dibeli dari PGN. Namun, Pertamina menolak permintaan itu. Akhirnya disepakati pemakaian harga pasar.

Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PLN Ali Herman Ibrahim ketika dimintai konfirmasi mengatakan, PLN harus mendapatkan kompensasi karena bersedia mengganti penggunaan gas menjadi solar. Dalam kesepakatan, diusulkan adanya subsidi pemerintah yang besarnya setara dengan solar 100 ribu kiloliter.

Itu berarti biaya pengadaan solar untuk mengganti gas akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. "Usulan PLN begitu," kata Ali. Namun, usulan yang baru diajukan ke pemerintah ini belum mendapatkan persetujuan. "Kami masih menunggu," ujarnya.

Menurut Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Yogo Pratomo, karena ada kompensasi itu, PLN tidak akan dirugikan secara keuangan. Biaya

energi yang dikeluarkan PLN tidak lebih besar dibanding ketika memakai gas.

Bagi PLN, kata Ali, kesediaan memberikan pasokan gasnya kepada industri di Jawa Timur berdasarkan pertimbangan bahwa ada industri yang betul-betul kekurangan gas sehingga sangat membutuhkan pasokan dari PGN.

Industri di daerah ini membutuhkan gas sebesar 10 juta kaki kubik per hari untuk membantu industri

kaca dan keramik yang kekurangan gas. Penggunaan gas itu akan digunakan pada 15 Agustus 2005 hingga 15 Agustus 2006.

Direktur Utama PT PGN W.M.P. Simanjuntak mengatakan, gas akan diprioritaskan bagi industri yang benar-benar membutuhkan. Industri yang akan mendapatkan adalah industri yang pemakaian gasnya tidak bisa digantikan dengan bahan bakar lain, seperti industri keramik.

● RETNO SULISTYOWATI

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 MAJALAH PILARS
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 76

TAHUN 2005

Pemadaman bergilir mengintai Jawa-Bali

Oleh APRIKA R. HERNANDA
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Suplai tenaga listrik di sistem pembangkitan Jawa-Bali kembali mengalami defisit daya sekitar 210 MW akibat gangguan operasi di PLTU Suralaya kemarin.

Kendala operasi berupa insiden kebocoran pada *economizer boiler* di unit 7 pembangkit listrik yang berkapasitas 600 MW itu diperkirakan baru akan selesai diperbaiki pada malam ini.

General Manager Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) PT PLN Muljo Adji A.G. menuturkan selama rehabilitasi unit pembangkitan tersebut, sistem Jawa-Bali rentan anjlok pada waktu beban puncak.

"Karena ada kebocoran pada boiler PLTU Suralaya unit 7, kondisi sistem Jawa-Bali diperkirakan defisit sampai besok malam [Jumat]. Hari ini [kemarin], perkiraan defisit 210 MW," katanya kemarin.

Penurunan daya mampu pembangkit di Jawa-Bali itu dimungkinkan menyebabkan pemadaman bergilir di daerah pelayanannya.

Namun, hal ini masih dapat diperhi-

tungkan kembali dengan memperhitungkan tegangan dan frekuensinya.

Tadi malam saja, PLN sudah menyusun rencana penurunan beban (*load shedding*) di enam daerah distribusi sehingga pemakaian daya tidak melebihi kapasitas pembangkit yang dapat dioperasikan.

Menurut Muljo, enam daerah distribusi di Jawa-Bali itu mendapatkan alokasi sesuai kapasitas pemakaiannya, a.l. DKI Jakarta yang mendapat porsi penurunan beban sebesar 83 MW, Banten 24 MW, Jabar 32 MW, Jateng 26 MW, Jatim 37 MW dan Bali 8 MW.

Hanya 10 menit

Pada kesempatan terpisah, Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN Sunggu Anwar Aritonang menuturkan rencana penurunan daya itu diperlukan

untuk mengatur jika diperlukan pemadaman bergilir.

"Kalau defisit 210 MW, dibagi rata di lima daerah kan kira-kira dapatnya 40 MW. Jika di setiap daerah harus padam paling hanya 10 menit, kan tidak masalah. Makanya kami tetap minta pemakaian dikurangi," ujarnya.

Muljo pun mengisyaratkan rentannya kemampuan daya pada waktu beban puncak sehingga PLN meminta pelanggan menurunkan pemakaiannya pada pukul 19.00-22.00 kendati gangguan operasi di Suralaya itu diperkirakan hanya akan terjadi dalam dua hari ke depan.

Menurut dia, perbaikan pemanas uap di pembangkit listrik bertenaga batu bara itu memang memerlukan waktu hingga besok malam.

Dengan demikian, daya mampu pembangkit akan kembali normal pada akhir pekan ini.

"Perbaikan kebocoran baru akan selesai Jumat malam dan bisa diaktifkan. Jadi diharapkan Minggu nanti unit 7 ini sudah beroperasi maksimal," ungkap Muljo. (apriska.hernanda@bisnis.co.id)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 MAJALAH PILARS
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 76

TAHUN 2005

PGN ingin pengalihan gas ke industri 15 Agustus

Oleh ADAM A. CHEVNY &
APRIKA R. HERNANDA
Bisnis Indonesia

JAKARTA: PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menginginkan rencana pengalihan suplai gas bumi dari PLTGU Gresik milik PT PLN ke konsumen industri dapat segera terealisasi pada 15 Agustus ini.

Hal itu dilakukan untuk menyelamatkan kalangan usaha di Jatim yang makin tercekik dengan keterbatasan pasokan gas untuk bahan bakar industrinya.

Direktur Utama PGN W.M.P. Simanjuntak menyatakan hal ini telah dibicarakan dengan PLN, sehingga perseroan gas hanya perlu memberikan kompensasi atau ganti rugi untuk BUMN listrik terkait pengalih-

an suplai itu.

"Memang hal ini akan kami ajukan dulu secara resmi ke pemerintah. Tetapi kami harapkan 15 Agustus sudah bisa terealisasi," katanya usai rapat dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Perindustrian Andung Nitimihardja, Rabu.

Rencana pengalihan gas dipastikan menghentikan suplai sekitar 10 million metric cubic feet per day (MMSCFD) untuk PLTGU Gresik yang kini dioperasikan anak perusahaan PLN, PT Pembangkitan Jawa Bali. Gas tersebut kemudian disuplai ke industri setempat.

Simanjuntak menegaskan hal ini hanya akan berlangsung sementara karena PGN

akan menerima tambahan pasokan dari Lapindo Brantas Inc dan PT Energi Mega Persada (EMP) sebanyak 20 MMSCFD.

Sementara itu, Direktur Produksi PT PJB Bagiyo Riawan menyebutkan pengalihan pasokan gas itu membutuhkan BBM pengganti sebanyak 280 kiloliter per hari. "Karena itu kami tidak akan melepaskan pasokan itu."

Menurut dia, kebutuhan gas PLTGU Gresik sendiri sebenarnya mencapai 280-300 MMSCFD. Namun saat ini jumlah pasokan hanya 120 MMSCFD yang diperoleh dari lapangan Kengean milik EMP sebanyak 10 MMSCFD (yang akan dialihkan itu) ditambah Kodeco 110 MMSCFD.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 MAJALAH PILARS
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2005

KORUPSI

PLN Bantah Mengintimidasi

JAKARTA, KOMPAS — Perusahaan Listrik Negara tidak pernah dan tidak akan mengintimidasi karyawannya, termasuk pengurus DPP Serikat Pekerja PLN. Mutasi yang dilakukan terhadap karyawan tidak membatasi hak karyawan dalam berorganisasi, termasuk terlibat dalam kepengurusan Serikat Pekerja PLN.

Demikian penjelasan tertulis Pelaksana Harian Sekretaris Perusahaan Moch Harry Jaya Pahlawan kepada *Kompas* hari Kamis (11/8). Penjelasan diberikan untuk menanggapi surat yang disampaikan Serikat Pekerja (SP) PLN kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam suratnya yang ditan-datangani Ketua Umum SP PLN Achmad Daryoko dan Sekjen M Yunan Lubis, mereka minta perlindungan kepada Presiden dan

Jaksa Agung.

Daryoko, Selasa (9/8), menegaskan, Sekjen SP PLN dipanggil Tim Disiplin Kepegawaian PLN. "Bahkan, gajinya dihentikan," kata Daryoko (*Kompas*, 9/8).

Dalam suratnya ke *Kompas*, Harry menegaskan, sejak 4 Maret 2005 Sekjen DPP PLN dipromosikan dari staf ahli bidang hukum di Sekretaris Perusahaan PLN Kantor Pusat menjadi Deputi Manajer Hukum dan Humas PLN Wilayah Sumatera Barat. Dengan kepindahan itu, pengambilan gaji dilakukan di tempat yang baru. "Yang bersangkutan belum mengambil gaji karena belum pindah tugas," tulis Harry.

Sejak Agustus 2005, Sekjen SP PLN diperiksa Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin karena tidak melaksanakan pindah tugas melebihi batas waktu tiga bulan yang ditentukan. (*/BDM)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 **12** 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : **T6**

TAHUN 2005

KI Batamindo kenakan tambahan biaya listrik

Oleh SUYONO SAPUTRA
Bisnis Indonesia

BATAM: Pengelola Kawasan Industri (KI) Batamindo mulai memberlakukan *electricity surcharge* sebesar Sin\$0,02 per kWh sejak 1 Agustus sebagai konsekuensi kenaikan bahan bakar solar.

Tambahan biaya listrik itu disosialisasikan kepada sekitar 80-an perusahaan asing di kawasan itu melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Jhon Sulistyawan selaku *General Manager* PT Batamindo Investment Cakrawala (BIC).

Dalam surat yang dibuat pada 28 Juli 2005 itu disebutkan kenaikan harga BBM terutama solar sejak Maret dan Agustus tahun ini telah memaksa perusahaan pengelola

itu untuk meninjau tarif listriknya.

Ketika kenaikan BBM pada 1 Maret, BIC sudah terlebih dahulu melakukan evaluasi tarif dengan menaikkan tarif sebesar Sin\$0,018 per kWh yang efektif sejak 16 April 2005.

Selanjutnya, pada kenaikan harga BBM per 1 Agustus, BIC hanya memberlakukan *electricity surcharge* sebesar Sin\$0,02 per kWh. Biaya tambahan ini akan ditinjau pada enam bulan ke depan.

Belum ada keterangan resmi dari BIC soal berapa tarif dasar listrik per kWh yang dikenakan kepada para tenant di kawasan itu. Sebab salinan surat yang diterima Bisnis itu hanya menyebutkan besaran

kenaikan.

Namun informasi dari salah satu perusahaan asing di KI Batamindo menyebutkan tarif listrik yang dibayarkan perusahaannya sebesar Sin\$0,168 per kWh dengan biaya beban mencapai Sin\$26.250 setiap bulan.

"Keseluruhan biaya listrik yang kami keluarkan paling rendah sekitar Sin\$50.000-an per bulan, tapi lebih sering membayar di atas angka Sin\$100.000-an per bulan," ujar sumber itu yang enggan disebutkan jati dirinya itu, kemarin.

Sumber itu mengakui besarnya kebutuhan listrik untuk perusahaannya, sebab untuk mesin yang harus bergerak selama 24 jam, dibutuhkan pasokan yang tidak terputus.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : /

TAHUN 2005

PLTU Suralaya Bocor

JAKARTA (Media): Sebagian besar wilayah Jawa-Bali akan mengalami pemadaman listrik sementara akibat terjadinya gangguan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, Jawa Barat.

General Manajer Pusat Pengendalian dan Pembagian Beban (P3B) PT PLN (persero) Muljo Adji mengungkapkan pipa pemanas air (*boiler*) pada pembangkit unit 7 pada PLTU Suralaya berkapasitas 600 megawatt (mw) mengalami kebocoran.

Penyebab kebocoran pipa itu hingga kini belum bisa dipastikan. "Kami perkirakan karena kondisi pipa yang sudah tua, sehingga tingkat ketahanan terhadap panas sudah menurun," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, perbaikan pipa mulai dilakukan sejak kemarin (11/8) dan diharapkan bisa selesai hari ini (12/8) dan akan langsung dioperasikan. Namun, pasokan listrik baru bisa normal pada Minggu (14/8), karena perlu waktu sekitar semalam untuk menaikkan suhu seperti semula.

Akibatnya kerusakan tersebut, pasokan listrik di sebagian besar Jawa-Bali terganggu. PLN memperkirakan, defisit yang terjadi pada saat beban puncak pukul 17.00-22.00 sebesar 210 mw (11/8) dan 250 mw (12/8). Kebutuhan daya pada saat beban puncak diperkirakan mencapai 14.500 mw, sedangkan kemampuan pasokan pembangkit 14.290 mw.

Oleh karena itu, PLN akan melakukan pemadaman sementara pada 11-12 Agustus 2005. Wilayah yang akan mengalami pemadaman adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

PLTU Suralaya terdiri dari tujuh unit pembangkit, dengan total kapasitas 3.400 mw. Satu unit berkapasitas 400 mw dan tiga unit berkapasitas 600 mw.

Defisit Pasokan Listrik



Wilayah	Megawatt
DKI Jakarta	83
Banten	24
Jawa Barat	32
Jawa Tengah	26
Jawa Timur	37
Bali	8

Sumber: PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)

GRAFIS: TIYOK

Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN, Sunggu Anwar Aritonang menyatakan meminta maaf atas kejadian tersebut dan meyakinkan tidak akan terjadi pemadaman dalam waktu lama.

"Kalau defisit di Jawa sebanyak 291 mw dibagi ke empat daerah, setiap daerah akan terkena pengurangan 50 mw. Itu sekitar 10 menit waktu pemadaman pada satu daerah, tidak akan terjadi langsung 24 jam mati listrik," jelasnya.

Ketika ditanya berapa besar dana untuk perbaikan kebocoran tersebut, GM P3B mengemukakan dari sisi rupiah (dana) tidak terlalu besar, karena hanya memperbaiki pipa yang bocor. "Besarnya dana untuk perbaikan tidak begitu besar jika dibanding dengan dampak yang ditimbulkannya," kata Muljo.

PLN mengharapkan pelanggan menghemat listrik untuk menghindari defisit. Sebelumnya, PLN mengampanyekan program hemat listrik pada saat pasokan gas ke PLTGU Muara Karang dan Tanjung Priok terhenti. (Sdk/E-3)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 23

TAHUN 2005

Sudah Saatnya Solar Diganti Gas

Dengan semakin berkurangnya ketersediaan bahan bakar minyak di Indonesia, PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Bali kini mencari alternatif pembangkit di luar BBM. Perusahaan penyuplai energi listrik itu mulai melirik gas untuk menggantikan solar yang selama ini dipakai sebagai energi proses produksi pembangkit listrik di Bali. Salah satu yang dikaji adalah penggunaan gas. Proses produksi dengan menggunakan tenaga gas dinilai lebih murah. "Harga gas bisa lebih murah hingga separuhnya," kata General Manajer PT Indonesia Power UBP Bali Mariyun Sanusi, di Denpasar, Kamis (11/8). Dikatakan, saat ini sudah ada tiga perusahaan swasta yang menawarkan tenaga gas sebagai bahan bakar produksi, namun dia enggan menyebutkan nama perusahaan tersebut. Saat ini PT Indonesia Power memiliki empat sub-unit pembangkit yaitu PLTD Pesanggaran dengan 11 mesin, PLTG Pesanggaran dengan empat mesin, PLTG Gilimanuk dengan satu mesin, dan PLTG Pamaron dengan dua mesin, semuanya menggunakan solar. (AGN)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 23

TAHUN 2005

KRISIS LISTRIK

Masalah di Sumut dan NAD
Teratasi hingga Januari 2006

MEDAN, KOMPAS — Perusahaan Listrik Negara Pembangunan Sumatera Bagian Utara menjanjikan bisa mengatasi krisis listrik di Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam dari 16 Agustus 2005 hingga Januari 2006. Selama hampir tiga pekan sebelumnya, wilayah Sumut dan NAD harus mengalami pemadaman bergilir akibat pasokan gas ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap di Sicanang, Belawan, Medan, berkurang.

Menurut Wakil Manajer Hukum dan Humas PT PLN Pembangunan Sumbagut Marodjahan Batubara, jaminan ketersediaan listrik hingga lima bulan ke depan karena pihaknya menunda pemeliharaan (*repowering*) mesin gas turbin 1.1 di salah satu blok PLTGU Belawan. Mesin gas turbin adalah instrumen penghasil energi listrik di PLTGU, sehingga jika dimatikan untuk *repowering*, otomatis pasokan listrik dari PLTGU Belawan berkurang.

"Mesin gas turbin 1.1 sedianya menjalani *repowering* tanggal 10 Agustus, namun mengingat dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat pemadaman, kami memutuskan untuk melakukan *repowering* Januari tahun

depan," kata Marodjahan, di Medan, Kamis (11/8).

Dikatakan, PLN mempertimbangkan dampak pemadaman bergilir saat masyarakat menghadapi perayaan Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus, Idul Fitri, dan Natal.

Selain karena pasokan gas berkurang, pemadaman bergilir yang dilakukan PLN Pembangunan Sumbagut juga dilakukan karena dua HRSG (*heat recovery steam generator*) atau mesin pengubah air menjadi uap panas yang menggerakkan turbin tengah menjalani perbaikan dan pemeliharaan. Salah satu HRSG selesai diperbaiki 16 Agustus nanti.

Hingga Selasa lalu masyarakat Kota Medan masih mengeluhkan pemadaman yang dilakukan PLN. Yeni, warga yang tinggal di Medan Selayang, menyatakan sangat terganggu dengan pemadaman listrik yang dilakukan PLN. Menurut dia, banyak alat elektronik yang digunakan menjadi cepat rusak.

PLN, menurut Marodjahan, tidak bisa memberikan jaminan tak akan ada lagi pemadaman, karena PLTGU Belawan memasok listrik, terutama saat beban puncak, masih defisit. (BIL)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 21

TAHUN 2005

Warga Bantul Tolak Pembangunan Sutet

YOGYAKARTA—Pembangunan saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet) di kawasan selatan Pulau Jawa akan terhambat. Pasalnya, menurut Direktur Teknik dan Distribusi PT PLN Persero, Herman Darnel, ada beberapa warga yang masih menolak keberadaan sutet tersebut di daerahnya.

Padahal kata dia, keberadaan sutet diharapkan bisa menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk listrik Jawa-Bali lebih dari 50 persen. Sehingga melalui pembangunan sutet penghematan BBM untuk listrik bisa dilakukan. "Seharusnya pembangunan sutet untuk jalur Pedan (Klaten)-Tasik Malaya selesai 17 Agustus 2005 ini. Namun target itu tidak mungkin bisa dipenuhi," kata Darnel, usai seminar sutet di UGM, kemarin (11/8).

Sebenarnya, lanjut Herman, saat ini hanya tinggal dua tower yang belum terpasang. Keduanya terletak di Dusun Kersen, Desa Sewon, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Pemasangan dua tower di dusun itu terhenti karena warganya menolak keberadaan sutet. "Tinggal dua tower saja sebenarnya, tetapi karena ini merupakan rangkaian, meski kurang satu tetap saja tidak bisa diope-rasikan," tambah Darnel.

Penolakan pendirian dua tower di Kersen ini, lanjutnya, belum bisa disimpulkan penyebab utamanya. Ada sebagian yang menolak karena

takut akan bahaya sutet terhadap kesehatan, tetapi ada juga yang menolak karena alasan belum sesuai soal kompensasi tanah. "Padahal kita memberi kompensasi tanah jauh di atas harga pasar."

Dengan terlambatnya pembangunan sutet di Jawa Selatan ini, lanjut Darnel, maka otomatis akan mengganggu pengembangan listrik di Jawa-Bali. Selama ini, jalur listrik hanya mengandalkan sutet Jawa utara yang kerap kali tidak bisa memenuhi kebutuhan.

Selain itu, jika sutet ini nanti selesai maka akan bisa mengaliri listrik dari pembangkit tenaga batu bara di Cilacap dan Tanjungjati sehingga bisa menjamin pasokan listrik di Jawa-Bali.

Menurut Darnel, sampai saat ini PLN belum berpikir untuk menggunakan Peraturan Presiden (Perpres) 36/2005 tentang Pembebasan Lahan untuk mengatasi masalah di Bantul itu. Pihaknya masih akan mengedepankan jalur musyawarah dengan elemen terkait.

Namun begitu, jika kondisi itu terus berlangsung maka PLN bisa saja menerapkan aturan tersebut secara paksa. "Tetapi kalau sudah memaksa, ya kita akan gunakan aturan tersebut karena ini menyangkut kepentingan nasional," tegasnya. Darnel, tidak menyebutkan tenggang waktu yang diberikan PLN untuk menyelesaikan pembangunan sutet. ■ yfi

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 MAJALAH PILARS
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 10

TAHUN 2005

INFO RINGKAS

**PLTU Suralaya Unit 7 Bocor, Listrik defisit
210 Megawatt**

JAKARTA - General Manager Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban PLN Jawa-Bali, Muljo Adji, mengumumkan adanya gangguan kebocoran pada boiler PLTU Suralaya unit 7 berkapasitas produksi 600 megawatt. Akibatnya kondisi sistem Jawa Bali pada 11 dan 12 Agustus defisit.

"Hari ini perkiraan beban puncak 14.500 megawatt, sedang pembangkit mampu produksi 14.290 megawatt, jadi defisit 210 megawatt," katanya, Kamis (11/8).

Menurut Adji, perbaikan kebocoran akan selesai Jumat (12/8) malam dan diharapkan pada Minggu (14/8) PLTU Suralaya unit 7 sudah beroperasi kembali.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN, Sunggu Anwar Aritonang, menyatakan minta maaf atas kejadian tersebut. Ia meyakinkan tak terjadi pemadaman dalam waktu lama.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 MAJALAH PILARS
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 16

TAHUN 2005

Pasokan Listrik PLN Kembali Defisit

PLN melakukan pemadaman bergilir di Jakarta, Jawa, dan Bali.

JAKARTA — Jumlah pasokan listrik PLN untuk konsumen di wilayah Jawa dan Bali kembali mengalami kekurangan (defisit) sebesar 210 megawatt (MW). Hal ini disebabkan oleh adanya gangguan kebocoran pipa ekonomiser pada alat pemanas (boiler) PLTU Suralaya unit 7 sejak Senin (8/8) malam.

Dengan adanya kebocoran pipa ekonomiser pada unit PLTU Suralaya berkapasitas 600 MW ini, menurut General Manager Pusat Pengaturan dan Pendistribusian Beban (P3B) PLN Jawa dan Bali Muljo Adji, maka beberapa tempat di wilayah Jawa dan Bali akan berpotensi mengalami pemadaman bergilir.

PLN kembali akan melakukan pemadaman bergilir sampai gangguan kebocoran ini dapat diatasi pada Jumat (12/8) malam," ujarnya.

Kebocoran tersebut, ungkap dia, lebih disebabkan oleh adanya bagian-bagian pipa tertentu yang dalam kurun waktu tertentu tidak dapat lagi menahan panas yang pada tingkat suhu tertentu. "Kebocoran seperti ini memang tidak bisa kita hindari, sewaktu-waktu bisa terjadi."

Dia menjelaskan, wilayah-wilayah yang mengalami potensi pemadaman hingga hari ini (Jumat, 12/8) yaitu DKI Jakarta (sebesar 83 MW), Banten (24 MW), Jawa Barat (32 MW), Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (26 MW), Jawa Timur (37 MW), dan Bali (8 MW).

Sebelumnya, pada Rabu (10/8) malam, kata dia, sudah terjadi pemadaman di sejumlah tempat di wilayah Jawa dan Bali. "Kemarin

malam (Rabu, 10/8) kita mengalami defisit 303 megawatt, dan terjadi pemadaman. Untuk yang kesekian kalinya kita minta pelanggan PLN untuk kembali melakukan penghematan supaya tidak terjadi pemadaman seperti sebelumnya. Tapi kita harapkan pada hari Minggu (14/8) nanti PLTU Suralaya unit 7 sudah dapat beroperasi kembali," paparnya.

Kompensasi gas

Sementara itu, setelah pemerintah memastikan pengalihan gas dari PLN Jatim kepada sektor industri di Jawa Timur, PLN berharap besaran kompensasi yang diberikan akan sesuai dengan kebutuhan. "Sekarang faktor koefisien (k) baru dan penalti untuk industri sudah dibuat. Kalau masih 'bleeding' (berdarah atau merugi terus-red) juga, saya juga tidak mau itu terjadi. Tetapi yang kami layani bukan

hanya segelintir pelanggan," kata Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT PLN (persero), Sunggu Anwar Aritonang di tempat terpisah, kemarin.

Dia menjelaskan pihaknya meyakini bahwa perusahaan milik pemerintah tersebut tidak akan mati karena aturan-aturan seperti itu. "Paling kami harus berpikir keras dimana lagi kami harus mencoba mencari penyelamatan perusahaan ini."

Saat ditanya tentang besaran kompensasi yang diharapkan, ia menjelaskan jika harus diganti dengan BBM maka seharusnya kompensasi yang diperoleh berasal dari selisih harga BBM dengan gas lalu dikalikan dengan jumlah tenaga listrik yang dihasilkan per jam. "Kira-kira beban biaya produksinya beda sekitar Rp 350 kalikan saja dengan kWh (kilowatt perjam) yang dihasilkan." ■ c25/ant

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input checked="" type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	13 14 15	16 17 18 19 20	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31								
HALAMAN : /											TAHUN 2005

GAS

PLN Minta Kompensasi Biaya



JAKARTA (Suara Karya): Terkait rencana pengalihan alokasi gas milik PLN ke industri di Jawa, BUMN tersebut meminta pemerintah menanggung

selisih biaya pemakaian gas dan BBM sebagai kompensasi. "Pengalihan alokasi itu kan membuat kami harus mengganti bahan bakar dari gas menjadi BBM. Ini tentu melahirkan biaya produksi tersendiri. Biaya itu pula yang kami minta bisa ditanggung pemerintah," kata Direktur Niaga dan Pelayanan PLN Sunggu Aritonang di sela sosialisasi kenaikan harga listrik industri, kemarin, di Jakarta.

Gagasan tentang pengalihan alokasi gas itu sendiri dilon-tarkan Departemen Perindustri-an. Dalam kaitan ini, guna mengatasi kekurangan pasokan gas PT Perusahaan Gas Negara

(PGN) ke pelanggan industri keramik di Jatim, PLN diminta mengurangi konsumsi gas. Untuk itu, PLN mengganti gas dengan bahan bakar minyak (BBM). Gagasan Menteri Perindustrian itu langsung disambut positif pihak PGN.

Namun demikian, menurut Sunggu, pengaturan mengenai rencana pengalihan alokasi gas PLN ini belum putus. Pemerintah dan PLN, katanya, masih bernegosiasi soal kompensasi bagi PLN. "Kami belum menemu- kani kata sepakat," katanya.

Menurut hitung-hitungan, papar Sunggu, perubahan bahan bakar gas ke BBM membuat beban yang ditanggung PLN jadi bertambah sekitar Rp 300 per Kwh. Jika menggunakan gas, biaya yang dikeluarkan PLN bernilai Rp 237 per Kwh. Sementara jika menggunakan BBM, biaya itu mencapai Rp 600 per Kwh.

Sunggu berharap pemerintah memenuhi janji mem-berikan kompensasi atas penga-

lihan alokasi gas PLN kepada industri ini. Terlebih semua kejadian yang dialami industri akibat penurunan pasokan gas pada dasarnya merupakan tanggung jawab PGN sebagai penyedia gas.

Pimpinan PGN sendiri, beberapa waktu lalu, mengaku akan menyelesaikan masalah itu sesuai etika bisnis dan atas dasar prinsip *win win solution*.

PGN menjamin defisit pasokan gas ini bisa pulih pada tahun depan. Itu karena mereka mendapatkan tambahan pasokan dari produsen gas di dalam negeri — antara lain dari Santos sebesar 100 juta kaki kubik. Pasokan tersebut diya- kini dapat mengatasi keku- rangan pasokan gas di Jawa.

Pimpinan PGN juga berha- rap, rencana pengalihan alokasi gas PLN ini dapat segera dilak- ukan paling tidak mulai Senin pekan depan (15/8). Itu karena kelangsungan operasi industri keramik di Jatim sudah teran- cam. (Rully)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 MAJALAH PILARS
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 10

TAHUN 2005

**Bali Undang Ahli Lingkungan ITB, UGM,
LIPI, BPPT**

DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali dalam waktu dekat akan mengundang beberapa pakar dari ITB, UGM, LIPI dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk mengkaji hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi geothermal di Bedugul.

Gubernur Bali Dewa Made Beratha di Denpasar, Kamis mengatakan, selain pakar dari institusi pendidikan tinggi tersebut, Pemprov Bali juga akan mengundang pihak Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, serta Kementerian Lingkungan Hidup. Termasuk para ahli terkait dari Bali sendiri, yakni Universitas Udayana dan Universitas Hindu Indonesia.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 MAJALAH PILARS
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6 ■ Meski Dinilai Merugikan PLN

TAHUN 2005

Pemerintah Tetap Alihkan Gas untuk PLN kepada Industri di Jatim

Jakarta - Pemerintah tetap akan mengalihkan gas yang selama ini untuk Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada industri di Jawa Timur (Jatim) melalui Perusahaan Gas Negara (PGN).

Oleh
MEGA CHRISTINA/ RUDY VICTOR SINAGA

Menteri Perindustrian Andung Nitimihardja mengungkapkan hal itu kepada wartawan usai Pembukaan Peresmian Rapat Kerja Departemen Perindustrian Tahun 2005 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/8) sore.

Sementara itu, manajemen PLN menilai kebijakan pengalihan gas itu justru akan berdampak buruk pada keuangan perusahaan.

"Tadi pagi saya baru berbicara dengan Pak Pur (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro - Red), PGN, PLN, BP Migas dan Pertamina," kata Andung. Sekarang gas tengah mengalami *shortage* (kekurangan), untuk sementara ini krisis.

Jadi salah satu usulan Departemen Perindustrian untuk mengatasi krisis jangka pendek adalah untuk sementara waktu gas (PLN) digantikan dengan BBM (Bahan Bakar Minyak).

Ia menyebutkan jatah gas PLN yang akan dialihkan untuk industri sebanyak 10 juta meter kubik per hari. Selanjutnya, biaya tambahan PLN karena menggunakan BBM akan dikonversi dengan pendapatan PGN dari jatah gas tersebut.

"September mungkin. (Pengalihannya) untuk satu tahun ini. Kita harapkan ada tambahan gas masuk dan Pertamina sudah siap BBM untuk PLN," tambah Andung.

Sementara itu, manajemen PLN yang dikonfirmasi SH tentang pengalihan gas itu menilai hal itu akan semakin memberatkan PLN. Ali Herman Ibrahim, Direktur Pembangkit dan Energi Primer PT PLN (Persero), kepada SH di Jakarta, Rabu (10/8) malam, mengatakan tidaklah mudah mengonversi gas ke BBM.

"Sebenarnya, posisi kita sekarang ini, ya, bertahan saja. Jujur saya katakan, kita berat untuk mengganti gas menjadi BBM. Sekarang saja kondisi kita sudah berat," ujarnya.

Ia mengungkapkan pihak

PLN sebenarnya membutuhkan pasokan gas 240 juta kaki kubik per hari, namun yang mampu dipasok hanya 10 juta kaki kubik. Itupun ternyata akan dialihkan sehingga notabene PLN tidak mendapat pasokan gas dan "dipaksa" harus menggunakan BBM.

Sebelumnya, Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM Yogo Pratomo menegaskan pemerintah siap memfasilitasi dalam penyelesaian B2B (*business to business*) yang disepakati untuk kompensasi bagi PLN setelah pasokan gasnya dialihkan ke industri.

"Semua akan kita sesuaikan, dengan kata lain PLN akan mendapatkan harga BBM sesuai dengan kemampuan PLN," ujar Yogo.

Tentang kemungkinan PLN mendapat harga BBM yang bersubsidi, Yogo belum memastikan namun tetap disesuaikan dengan kemampuan PLN.

"Kalau perlu disubsidi ya disubsidi, tapi yang pasti PLN tidak harus mendapat kerugian dari pengalihan gas itu," jelasnya.

Yogo mengakui bahwa PLN harus mengeluarkan biaya energi yang tidak lebih banyak dibandingkan menggunakan gas. PLN juga bisa mengkonversi pembangkit yang menggunakan gas ke BBM. ■

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 MAJALAH PILARS
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **11** 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2005

PLN Tambah Pembangkit NonBBM di Aceh

Jakarta - PT PLN (Persero) merencanakan penambahan sejumlah pembangkit tenaga listrik yang menggunakan bahan bakar non-BBM. Hal itu dimaksudkan untuk memulihkan sistem distribusi tenaga listrik di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Penambahan pembangkit listrik itu adalah PLTA Peusangan, PLTU Batu Bara di Meulaboh, dan PLT Panas Bumi di Aceh Besar. "Selain di sisi pengaturan penyaluran tenaga listriknya, juga akan dibangun jaringan transmisi yang menghubungkan kota di pantai timur dan barat, dari Bireun hingga Meulaboh," ujar Direktur Utama PT PLN (Persero) Eddie Widiono, saat menerima bantuan peralatan listrik dari PT Schneider Indonesia di Jakarta, Rabu (10/8).

Anak perusahaan Schneider Electric yang berpusat di Perancis itu memberikan bantuan berupa 68.663 unit *miniatur circuit breaker* dan 21 unit *medium voltage cubicle* berkapasitas 24 kV untuk pemulihan instalasi gardu distribusi di Aceh.

Eddie berharap penambahan sejumlah pembangkit tenaga listrik di Aceh itu akan mampu memenuhi kebutuh-

an tenaga listrik secara merata, handal dan ekonomis di provinsi yang terkena bencana gempa bumi dan tsunami akhir Desember tahun lalu.

Secara umum kondisi kelistrikan di Aceh pascatsunami telah membaik, bahkan di Banda Aceh dan Meulaboh sudah terpenuhi 100 persen. Daerah-daerah yang masih belum tertangani sistem kelistrikannya adalah di wilayah pantai barat Aceh yang memang terisolasi. Kendalanya adalah banyaknya jalan dan jembatan yang rusak parah atau putus seperti Calang atau Teunom.

Dirut PLN menambahkan di tengah upaya pemulihan kondisi kelistrikan di Aceh itu, pasokan tenaga listrik yang sebagian dipasok dari sistem pembangkitan Sumatera Utara sempat terkendala karena krisis pasokan BBM yang terjadi secara nasional.

"Belum lagi kesulitan keuangan akibat kenaikan harga BBM, kuota BBM yang lebih kecil dari rencana kebutuhan PLN di tahun 2005 dan harus menanggung defisit biaya BBM akibat dikenakan harga pasar untuk kelebihan pemakaian kuota itu," kata Edie. (rudy victor sinaga)